

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH TAHUN 2022
DI KOTA PEMATANG SIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sari Exsa Ulina Sirait

NPP. 30.0143

Asdaf Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email : Sari.e.sirait@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Samsul Arifin, S.Pd, M.M

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Community participation in development planning in Pematang Siantar City has a very important value. The main foundation is because the existence of the concept of development is intended for community participation, especially in the planning process. **Purpose:** the purpose of this study was to determine community participation in development planning in the City of Pematang Siantar and to explain the inhibiting factors and supporting factors for community participation in development planning in the City of Pematang Siantar. **Methods:** This study was conceptualized based on the theory of community participation put forward by Mardikanto and Soebianto with a descriptive qualitative research method and an inductive approach. Data obtained using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique used is done by reducing data, displaying data, drawing conclusions / verification. Analyze in more detail and code the data to be analyzed. **Results/Findings:** From the results of the research conducted, it shows that Community Participation in Development Planning in the City of Pematang Siantar is quite good. This is indicated by the dimensions of opportunity, willingness and ability to participate. However, it is still found that human resource indicators have not run properly. Supporting factors and inhibiting factors of Community Participation in Development Planning in Pematang Siantar City, namely support from the government, good coordination between agencies, openness of the community to new things with inhibiting factors namely limited knowledge and insight of the community, lack of community willingness, geographical conditions quite difficult, the quantity of human resources is low, the legacy of the previous bureaucracy and budget constraints. **Conclusion:** By looking at the conditions in the field, the researchers concluded that the government's efforts to optimize all plans and performance are getting better.

Keywords: *Community Participation, Development, Development Planning*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Pematang Siantar mempunyai nilai yang sangat penting. Landasan utamanya dikarenakan adanya konsep pembangunan memang ditujukan agar ada partisipasi masyarakat, khususnya dalam proses perencanaan. **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Pematang Siantar dan menjelaskan faktor penghambat serta faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Pematang Siantar. **Metode:** Penelitian ini dikonseptkan berdasarkan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dilakukan dengan pengurangan data, tampilan data, gambar kesimpulan /verifikasi. Menganalisis lebih detail dan memberi kode data yang akan dianalisis. **Hasil/Temuan:** Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Pematang Siantar sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari dimensi kesempatan, kemauan, dan kemampuan untuk berpartisipasi. Namun masih ditemukannya indikator sumber daya manusia belum berjalan dengan semestinya. Faktor pendukung dan faktor penghambat dari Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Pematang Siantar yaitu dukungan dari pemerintah, koordinasi yang baik antar instansi, keterbukaan masyarakat terhadap hal-hal baru dengan faktor penghambat yaitu keterbatasan pengetahuan dan wawasan masyarakat, kurangnya kesediaan masyarakat, keadaan geografis yang cukup sulit, kuantitas SDM pegawai rendah, warisan birokrasi terdahulu dan keterbatasan anggaran. **Kesimpulan:** Dengan melihat kondisi dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa Upaya yang dilakukan dari pemerintah dengan mengoptimalkan segala rencana dan kinerja agar semakin baik.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Perencanaan Pembangunan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang terarah pelaksanaannya memerlukan sebuah perencanaan yang mampu mewujudkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan dimana perencanaan pembangunan ini dilaksanakan oleh berbagai pihak penyelenggaraan negara dan masyarakat baik di tingkat pusat ataupun daerah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), kedudukan sebuah perencanaan pembangunan di daerah

semakin kuat. Argumentasi yang semula berkembang tentang tidak perlunya pembangunan diatur melalui sistem perencanaan dalam era otonomi daerah, otomatis sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka penyusunan perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap aparat pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan bila hal ini tidak dilakukan akan menimbulkan permasalahan hukum tertentu.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Dalam peraturan ini menyatakan bagaimana pelaksanaan RPJMD, di mana dalam hal ini pemerintah daerah akan melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya dimana Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam peraturan ini terdapat bagaimana RPJMD berfungsi menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD selama kurun waktu tahun 2019-2023, dengan perangkat daerah dalam menyusun Renstra dan Renja serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2023, di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup 20 Tahun pembangunan daerah, kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disebut juga dengan RPJMD yang merupakan dokumen yang merinci visi, misi, dan program kepala daerah sekaligus memberikan arahan bagi RPJPD dan memperhatikan RPJMN. Meliputi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dan yang terakhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu rancangan kerangka ekonomi daerah dengan prioritas pembangunan daerah dimana rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kota Pematang siantar memiliki beberapa organisasi perangkat daerah, salah satunya yang menjadi fokus penulis adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pembangunan disuatu daerah tidak akan terlepas dari peranbappeda. Bappeda merupakan sebuah badan yang yang bertugas melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah. Bappeda juga badan yang bertanggungjawab langsung kepada walikota atau bupati. Sama hal dengan daerah lainnya yang melaksanakan Musrenbang, Provinsi Sumatera Utara juga salah satu daerah yang melakukan peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan musrenbang, untuk merangkum program masing-masing Daerah Kabupaten /Kota agar memiliki tujuan yang sama dengan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara. Satu diantaranya adalah Kota Pematang siantar yang terkendala untuk mewujudkan aspirasi oleh masyarakat dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah yang terjadi di tiga tahun terakhir.

Dapat dikatakan pelaksanaan perencanaan pembangunan sangat memerlukan pendekatan partisipatif. Dimana proses perencanaan pembangunan akan sesuai dengan apa yang pemerintah dan seluruh masyarakat daerah tersebut harapkan dengan kombinasi dari pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-up*. Perencanaan Pembangunan dengan menggunakan pendekatan tersebut merupakan cara dalam pencapaian sebuah pembangunan yang telah lama dimimpikan oleh masyarakat.

Perencanaan pembangunan partisipatif yang akan dilaksanakan pemerintah daerah akan mengarah pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan partisipatif mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat satu diantaranya dengan mantapnya pelaksanaan musrenbang sebagai tahapan penyusunan pada tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi.

Hubungan antara partisipasi masyarakat dengan peran dari pemerintah sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat sangat memberi pengaruh pada pelaksanaan pembangunan. Didasari pada sebuah pemikiran banyak orang yang menganggap bahwa partisipasi dari masyarakat pada pembangunan hanya mengenai pada tahap pembuatan keputusan dan menikmati hasil dari pembangunan. Namun pada arti yang sesungguhnya partisipasi dalam mengambil kegiatan, dalam pengembangan suatu proses dari tahap penyusunan dan pemrograman melalui perencanaan dan pengembangan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan Theresia dkk ,(2015;196).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dan berbagai pihak dalam terselenggaranya perencanaan pembangunan di kota Pematang siantar memiliki peningkatan tiap tahunnya. Ada banyak aktor yang ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan baik dari pihak pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta, dari keikutsertaan partisipasi dari pelaku pelaksanaan perencanaan pembangunan, ada hubungan kekuasaan yang terjalin mengenai pengetahuan yang akan dibawa dalam proses menyusun langkah-langkah yang melibatkan berbagai unsur untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang guna meningkatkan kesejahteraan lingkungan sosial di suatu daerah atau daerah dalam jumlah waktu yang ditentukan menurut Riyandi dan Deddy (Asrofi 2013 : 7). Oleh sebab itu, perlu diketahui yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung yang akan mempengaruhi partisipasi dari masyarakat dan berbagai pihak dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan alasan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dikarenakan keikutsertaan serta adanya aspirasi yang diberikan oleh masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi keberlangsungan proses perencanaan pembangunan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam bidang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian oleh Khansa tahun 2022 dengan judul Perencanaan Pembangunan Partisipatif Guna Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Secara umum perencanaan pembangunan partisipatif di badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten musu banyuasin telah berjalan dengan baik.

Penelitian oleh Firdyasti tahun 2021 dengan judul Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pelaksanaan Musrenbang di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan Proses pelaksanaan musrenbang sudah berjalan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan proses *bottom-up*, sedangkan proses *top-down* diimplementasikan dalam bentuk program unggulan daerah. Penelitian oleh Usman tahun 2021 dengan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di kabupaten merauke provinsi papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berdasarkan teori sudah dilaksanakan dengan cukup baik akan tetapi belum optimal dikarenakan adanya indikator yang belum terpenuhi dalam pelaksanaannya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berfokus pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif Guna Mewujudkan Aspirasi Masyarakat dan Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sedangkan penulis lebih berfokus kepada Partisipasi Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya perbedaan aspek-aspek tertentu artinya penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya menunjukkan penelitian penulis berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan Untuk mendapatkan gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022 di Kota Pematang Siantar Untuk memperoleh gambaran faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022 di Kota Pematang Siantar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis ingin memberi gambaran secara nyata dalam perilaku dan situasi lingkungan yang sedang terjadi saat penelitian berlangsung penelitian deskriptif memberikan gambaran mengenai sikap dan perilaku yang telah dialami selama penelitian. Adapun operasional konsep penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan teori syarat tumbuh danberkembangnya partisipasi masyarakat dari Mardikanto (2012 : 84) teori determinan efektivitas perencanaan pembangunan dari Widodo (2019 : 7), dimana faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat, dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Penyedia informasi dalam penelitian ini dipilih berdasarkan tingkat pemahamannya terhadap isu yang menjadi subjek penelitian. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan

menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data kualitatif seperti data teks dari transkrip pada wawancara. Penekanan dalam analisis kualitatif adalah “membuat akal” atau memahami suatu fenomena dari pada memprediksi atau menjelaskan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang implementasi fungsi pengawasan politik Bawaslu dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut menggunakan konsep pendekatan implementasi kebijakan George C. Edward III dengan empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti melakukan pengumpulan dengan dokumentasi dan wawancara.

3.1 Partisipasi Dalam Perencanaan

Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Pematang Siantar

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Pematang Siantar mempunyai nilai yang sangat penting. Landasan utamanya dikarenakan adanya konsep pembangunan memang ditujukan agar ada partisipasi masyarakat, khususnya dalam proses perencanaannya. Ketika penyelenggaraan musrenbang tingkat Kampung dilakukan, kenyataan yang terjadi adalah mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan di tingkat kampung ternyata belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam memutuskan prioritas kegiatan. Padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

1. Kesempatan

Dalam hal ini, keikutsertaan masyarakat yang dimaksud adalah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik tingkat Kampung, hingga Kota Pematang Siantar. Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Pejabat Pemda Kota Pematang Siantar dalam setiap forum-forum perencanaan seperti musrenbang selalu melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh wanita selalu diundang untuk menghadiri musrenbang. Dalam praktiknya, pemerintah daerah baik pegawai Bappeda maupun pegawai Kampung yang juga sudah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan bukan *planner*. Fungsi *planner* sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat.

2. Kemauan

Kemauan dari masyarakat untuk berpartisipasi sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki mutu hidupnya adalah hal pertama. Selain itu adalah bagaimana kesediaan masyarakat untuk

meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pelaksanaan pembangunan, keterlibatan dalam kebersamaan untuk memecahkan masalah, serta kemandirian dan kepercayaan diri dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan.

Tabel 1
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kota Pematang Siantar 2022

No	Kecamatan	Indikator Keaktifan Berpartisipasi (%)		
		Tidak Berperan Serta/Tidak Hadir	Hadir tetapi Tidak Aktif Berperan Serta	Hadir dan Aktif Berperan Serta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Siantar Barat	11,76	11,76	76,47
2	Siantar Marihat	19,20	32,11	66,20
3	Siantar Martoba	10,52	21,33	64,65
4	Siantar Selatan	14,71	20,59	64,71
5	Siantar Marimbun	2,94	8,82	88,24
6	Siantar Sitalasari	23,33	23,11	40,21
7	Siantar Timur	11,76	17,65	70,59
8	Siantar Utara	11,43	32,71	85,29

Sumber : Bappeda Kota Pematang Siantar

3. Kemampuan

Kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui, menggali, dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan yang sedang berkembang di masyarakat. Dengan kemampuan yang memadai, masyarakat akan mampu melakukan kegiatan penyelidikan guna memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat, kondisi, dan potensi yang ada di Kota Pematang Siantar yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Kemampuan yang masih rendah dari masyarakat yang menyebabkan mutu hidup masyarakat tidak mengalami kemajuan yang signifikan dan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Kesempatan-kesempatan yang ada untuk berpartisipasi juga tidak dapat memahami dan dimanfaatkan masyarakat dengan baik.

3.2 Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Pematang Siantar

Faktor Pendukung

1. Dukungan dari Pemerintah

Pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ialah instansi yang memiliki wewenang dalam proses perencanaan pembangunan. Adapun program dan kegiatan pembangunan ialah yang telah disusun di bawah koordinasi Bappeda baik dalam program-program pembangunan regular maupun program-program yang baru dirancang dalam rangka mendorong setiap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hampir semua kegiatan program dari Bappeda ditanggapi dengan baik serta didukung dan dibantu dalam pelaksanaannya oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar.

2. Koordinasi yang Baik Antar Instansi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melakukan koordinasi dengan setiap instansi yang memiliki tujuan yang sejalan dengan Bappeda dalam rangka mendorong partisipasi dari masyarakat pada proses perencanaan pembangunan dan menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Pematang Siantar. Bagaimana Bappeda yang sebagai koordinator perencanaan pembangunan harus mampu secara teliti merumuskan program-program dan melakukan hubungan-hubungan dengan berbagai pihak baik itu legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat, termasuk instansi vertikal seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan masyarakat Daerah, serta harus cepat tanggap terhadap aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi. Salah satu media komunikasi yang bersifat nonelektronik atau bersifat konvensional yang menyediakan papan pengumuman yang diletakkan pada setiap kantor Kampung. Selain papan pengumuman tersebut, juga dipasang beberapa spanduk informasi khusus yang berisi hal-hal penting terkait perencanaan pembangunan. Selain hal tersebut, upaya yang telah dilakukan melalui media elektronik adalah pemanfaatan *website* resmi dari Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar. Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar dapat menyampaikan informasi-informasi terkait perencanaan pembangunan melalui situs *website* tersebut.

3. Keterbukaan Masyarakat Terhadap Hal-Hal Baru

Sebagai masyarakat juga dapat memberikan tanggapan untuk setiap program-program yang akan ditawarkan oleh pemerintah terkait dengan program pembangunan yang tujuannya meningkatkan kemampuan masyarakat yang memiliki kapasitas yang sudah cukup baik cukup untuk menyusun setiap perencanaan pembangunan yang baik di Kota Pematang Siantar. Keterbukaan ini juga tidak terlepas dari bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mencari pengetahuan maupun informasi mengenai pembangunan.

Faktor Penghambat

Faktor Internal

- a. Keterbatasan Pengetahuan dan Wawasan Masyarakat
Dari Keterbatasan pengetahuan dan wawasan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang belum memenuhi syarat. Namun pelaksanaan dan proses perencanaan pembangunan dalam penyampaian setiap aspirasi, tingkat pendidikan tersebut bukan dijadikan tolak ukur didalam masyarakat. Kemudian peristiwa ini yang menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam setiap mengemukakan pendapat pada perencanaan pembangunan yang berlangsung
- b. Kurangnya Kesediaan Masyarakat
Kurangnya kesediaan masyarakat menjadi kendala atau hambatan yang juga perlu diperhatikan untuk setiap partisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Adanya pemikiran dari masyarakat bahwa kegiatan musrenbang sebagai salah satu proses perencanaan pembangunan yang hanya berkegiatan pada tahun-tahun yang bersifat formalitas tanpa adanya realisasi dan perubahan.

Faktor Eksternal

- a. Keadaan Geografis yang Sulit
Kota Pematang Siantar yang memiliki kondisi wilayah yang luas dan letak geografis yang cukup unik menjadi sebuah PR dalam pelaksanaan tugas. Beberapa Kampung dan Kecamatan di Kota Pematang Siantar yang memiliki jarak dengan sarana dan prasarana yang tidak sebaik kampung dan kecamatan lain, hal ini yang menjadi hambatan bagi bappeda dalam pelaksanaan tugasnya. Masyarakat masih banyak merasakan bantuan dana dan kepedulian dari pemerintah terhadap pembangunan ada yang belum mengenai sasaran di tiap kampung maupun kecamatan yang membutuhkan.
- b. Kuantitas SDM Pegawai Rendah
Setiap pegawai yang berada di Bappeda telah memiliki kuliatas dan kuantitas yang memadai untuk terjun langsung ke lapangan, dimana telah memiliki kompetensi mengenai perencanaan pembangunan. Di sisi lain kualitas dan kuantitas dari setiap SDM di tingkat kecamatan dan desa masih rendah. Pegawai yang membantu setiap agenda perencanaan pembangunan terbilang sangat sedikit . Hal tersebut yang terkadang menyulitkan dalam kegiatan-kegiatan untuk pendampingan bagi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Jumlah pegawai yang masih kurang dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan tidak maksimal.
- c. Warisan Birokrasi Terdahulu
Birokrasi yang terus berkembang mengakibatkan banyaknya perubahan dalam setiap pelaksanaannya. Namun, dada bagian dari pegawai yang menganggap bahwa gaya birokrasi yang lama baik sehingga masih baik dalam pelaksanaan dan praktiknya untuk pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.
- d. Keterbatasan Anggaran
Keterbatasan anggaran yang sering sekali menjadi hal yang krusial dalam sebuah

perencanaan pembangunan ditengah-tengah masyarakat dan juga sangat menentukan sejauh mana partisipasi masyarakat bisa terjadi. Keterbatasan anggaran yang dimaksud disini dibagi menjadi dua aspek. Pertama, keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan potensi pegawai dibidang perencanaan. Kedua, Keterbatasan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun Kota Pematang Siantar masih belum mencukupi semua kebutuhan pembangunan dengan memprioritaskan setiap kebutuhan pembangunan yang paling membutuhkan.

3.3 Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil

Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam memecahkan kendala dan memanfaatkan faktor pendukung

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi sebuah coordinator yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan yang berdampak sangat luas dalam aplikasi perencanaan pembangunan akan dirasakan langsung oleh setiap masyarakat. Bappeda Kota Pematang Siantar melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi setiap kendala, yaitu partisipasi masyarakat memerlukan pembinaan dan peningkatan agar dapat memberikan perencanaan pembangunan yang memenuhi sasaran yang diharapkan oleh masyarakat. Secara rinci dibawah ini akan dibahas upaya Bappeda Kota Pematang Siantar.

1. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi merupakan sebuah kegiatan awal yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk memberikan informasi, pemahaman, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi, diharapkan dapat melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Memanfaatkan Media Komunikasi

Partisipasi masyarakat terhadap sebuah program pembangunan yang akan sangat bergantung pada kelancaran komunikasi informasi antara penyelenggara yakni pemerintah dengan penerima manfaat yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan sebuah proses perencanaan pembangunan. Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar sudah menggunakan berbagai media komunikasi yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar memanfaatkan media komunikasi baik secara elektronik maupun nonelektronik.

3. Menjalinkan Hubungan dan Komunikasi yang Baik

Menjalinkan sebuah relasi merupakan salah satu syarat mutlak dalam mempertahankan keharmonisan hubungan antar dua pihak. Dalam konteks ini, aparat Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik yang mampu menciptakan inovasi dalam membina hubungan atau relasi tersebut dengan masyarakat. Tentu saja hal ini yang akan berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menemukan apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi proses pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Pematang Siantar yaitu: Dukungan dari pemerintah mendorong setiap program dibawah koordinasi Bappeda, Pemerintah daerah memanfaatkan media komunikasi baik secara elektronik maupun nonelektronik, Keterbukaan masyarakat terhadap hal-hal baru berkaitan dengan program dan tujuan untuk menyusun setiap perencanaan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Keterbatasan pengetahuan dan wawasan masyarakat membuat inisiatif masyarakat menjadi rendah dalam melaksanakan setiap proses, Anggaran yang terbatas menyebabkan pembangunan yang terbatas, Keadaan Geografis yang sulit dalam pelaksanaan lapangan menyebabkan kegiatan perencanaan pembangunan tidak selesai. Hal ini hampir sama dengan penelitian Usman dimana Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berdasarkan teori sudah dilaksanakan dengan cukup baik akan tetapi belum optimal dikarenakan adanya indikator yang belum terpenuhi dalam pelaksanaannya

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dapat diwujudkan dengan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa setiap pembangunan yang diinginkan akan terselesaikan dan mewujudkannya secara nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat. Namun dibutuhkan usaha untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang diharapkan pada setiap proses perencanaan pembangunan dengan adanya kemampuan komunikasi. Komunikasi yang berjalan dengan baik dan dipahami untuk setiap usia di masyarakat yang akan memudahkan masyarakat juga dalam menerima maksud dan tujuan dari setiap program yang disampaikan melalui aspirasi dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Pematang Siantar, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Pematang Siantar telah berjalan sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dapat dilihat dari 3 dimensi yaitu kesempatan, kemauan, dan kemampuan. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Pematang Siantar dalam pelaksanaannya memiliki faktor pendukung yang mempengaruhi proses pelaksanaannya seperti dukungan dari pemerintah, memanfaatkan media komunikasi, dan keterbukaan masyarakat. Adapun faktor penghambat letak geografis, Keterbatasan pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta anggaran yang terbatas. Upaya perencanaan pembangunan dalam memecahkan kendala memberikan keyakinan dan mewujudkan partisipasi dapat memberikan perencanaan pembangunan yaitu: Melakukan sosialisasi, memanfaatkan media, dan Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu dalam mewawancarai para informan. Akan tetapi akhirnya penulis bisa mewawancarai seluruh informan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Pematang Siantar beserta jajaran dan Camat Siantar Utara serta Camat Siantar Marimbun beserta jajaran dan juga untuk kelurahan siantar Barat dan Kelurahan Siantar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asrofi, M. (2013). Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Firdyasti, C. (2021). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pelaksanaan Musrenbang di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.
- Khansa, A. (2022). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Guna Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
- Mardikanto, T. dan P. soebianto. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Theresia, A., Khrisna, S. A., & Prima, G. P. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo. (2019). *Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kompas Metode Nusantara.

Usman, H. M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di kabupaten merauke provinsi papua.

